

DI TENGAH PANDEMI, PILKADA BUKAN PRIORITAS

Tiga kali jajak pendapat Kompas mengindikasikan pelaksanaan pilkada bukan prioritas bagi sebagian masyarakat, apalagi di tengah masih tingginya penambahan jumlah kasus positif Covid-19. Sikap publik cenderung memilih agar pilkada tidak digelar saat pandemi.

TOPAN YUNIARTO

Setalakanya keinginan itu didapat dari rangkaian jajak pendapat Kompas selama tiga periode, yakni 24-25 Maret 2020, 22-24 April 2020, dan 4-5 Juni 2020. Ketiga jajak pendapat menegaskan opini publik yang cenderung menginginkan pelaksanaan pilkada ditunda di masa ini. Pendapat publik ini wajar karena merujuk pada kondisi lapangan dan lingkungan kota ditendeki responden, yakni situasi pandemi Covid-19 masih mengkhawatirkan. Upaya memulihkan pelaksanaan pilkada di tengah pandemi sama saja mempertaruhkan keselamatan dan kesehatan.

Pada jajak pendapat Kompas akhir Maret 2020, misalnya, dukungan terhadap penundaan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah diungkapkan oleh 91,8 persen responden. Perihal pelaksanaan pemungutan suara, sebanyak 73,7 persen respon-

surah dalam pilkada. Opini pertama, pemungutan suara dilakukan pada 9 Desember 2020. Opini kedua, pemungutan suara dilaksanakan 17 Maret 2021, sementara opini ketiga, pemungutan suara berlangsung pada 29 September 2021.

Jajak pendapat Kompas berikutnya, periode 22-24 April 2020, menunjukkan, sebanyak 69,2 persen responden memilih pilkada dilaksanakan pada 2021. Dari angka persentase tersebut, sebanyak 32,2 persen memilih pilkada diselenggarakan pada 17 Maret 2021 dan 36,9 persen memilih dilaksanakan pada 29 September 2021. Hanya 16,9 persen yang memilih pilkada dilaksanakan 9 Desember 2020.

Kecenderungan pilihan responden jajak pendapat Kompas tersebut lebih jauh terlepas dari kecemasan yang masih mengkhawatirkan warga. Sejumlah analisis menyebutkan, wabah bisa berlangsung sampai esian bulan, akhir tahun, bahkan hingga setahun ke depan. Selain bisa dipecahkan penyebaran virus korona di Indonesia akan terkendali.

Periode jajak pendapat pada akhir Maret dan April tersebut dilaksanakan sebelum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 terkait pilkada serentak 2020 ditetapkan Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020. Setelah perppu itu terbit, Kompas kembali melakukan jajak pendapat pada 4-5 Juni 2020. Hasilnya, 66 persen responden berharap pilkada daerah tahun depan. Sebaliknya, 29,8 persen menyetujui pilkada bisa dilungsurkan tahun ini.

Tanggapan dan reaksi yang muncul bahasanya tetap sebal. Publik khawatir, jika pilkada tetap dilaksanakan, hal itu akan berdampak pada semakin banyaknya kasus positif Covid-19. Apalagi, jumlah kasus positif Covid-19 masih terus bertambah.

Kasus Covid-19

Pada 9 Juni 2020 terjadi penambahan 1040 kasus positif Covid-19 Provinsi DKI Jakarta kembali mengalami penambahan kasus terburuk, yakni 232 kasus baru. Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, Provinsi Jawa Timur mengalami lonjakan kasus baru. Pada 9 Juni, ada 220 kasus baru di Jatim. Jika pilkada dilakukan di tengah situasi pandemi yang tak menentu, pelaksanaan di Jawa Timur sangat riskan.

Di Jawa Timur, ada 16 pilkada bupati dan wakil bupati, meliputi Kabupaten Ngawi, Jember, Lamongan, Ponorogo, Blitar, Situbone, Kediri, Sumedang, Gresik, Madiun, Mojokerto, Pechan, Trenggales, Sidoarjo, Tuban, dan Banyuwangi. Pilkada di Jawa Timur juga akan menggelar pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Surabaya, Blitar, serta Pasuruan.

Sementara itu, kondisi pandemi Covid-19 di Surabaya masih mengkhawatirkan. Sampai 9 Juni 2020 tercatat 3.260 kasus kumulatif positif atau naik 76 persen dari pada hari sebelumnya. Di kota ini tercatat pula 296 pasien meninggal akibat Covid-19 atau naik 1 persen ketimbang hari sebelumnya. Jumlah kasus meninggal di Surabaya ini setara dengan 57,6 persen dari seluruh kasus meninggal di Jawa Timur, yakni 514 kasus meninggal.

Kalimantan Selatan yang akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dengan jumlah pemilih yang terbesar di semua kabupaten dan kota memiliki pandemi yang hampir sama. Jumlah kasus Covid-19 cenderung bertambah. Hingga 9 Juni 2020 tercatat akumulasi 1.438 kasus positif Covid-19 dengan 104 pasien di antaranya meninggal.

Hal serupa terjadi di Sulawesi Selatan. Per 9 Juni 2020 tercatat 180 kasus baru sehingga total ada 2.194 kasus positif dengan 97 pasien meninggal. Sebel akan mel-

aksanakan 11 pilkada di Kabupaten Barru, Gowa, Maree, Soppeng, Lurus Timur, Pangkajene dan Kepulauan, Lurus Utara, Bulukamba, Tana Toraja, Kepulauan Selayut, serta Toraja Utara. Selain itu, ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota di Kota Makassar.

Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat juga akan melaksanakan pilkada. Sejak awal pandemi, dua provinsi itu mencatat kasus yang tergolong tinggi. Di Jabar, misalnya, meskipun ada kecenderungan penurunan jumlah kasus, lesuhannya wilayah itu dengan Jakarta (epicenter kasus Covid-19) tetap harus diwaspadai. Adapun Jateng, sebagai perlintasan perjalanan darat dari Jatim ke arah Jakarta dan Jabar atau sebaliknya, juga harus siap siaga.

Di Jabar dan Jateng ada penambahan kasus sebanyak 25 dan 32 kasus pada 9 Juni. Akumulasi kasus di Jabar sebanyak 2.444 kasus, sementara di Jateng 1.674 kasus. Jumlah kematian di Jabar 161 kasus, sedangkan di Jateng 103 kasus.

Jateng akan melaksanakan pilkada di 17 kabupaten, meliputi Kabupaten Semarang, Kebumpeh, Kebumpeh, Purworejo, Sragen, Klaten, Pemalang, Grobogan, dan Demak. Ada pula pilkada wali kota di Pakhalangan, Semarang, Magelang, serta Sukakarta.

Adapun Jabar akan menyelenggarakan pilkada di tujuh kabupaten, yaitu Sukahmadi, Bandung, Indramayu, Ciamis, Tasikmalaya, Karawang, dan Puncakdaras, ditambah pilkada wali kota di Kota Depok.

Pilkada serentak gubernur dan wakil gubernur akan diselenggarakan di 9 provinsi, sementara pilkada kabupaten diselenggarakan di 224 kabupaten dan pilkada wali kota di 37 kota. Kesembilan provinsi yang menggelar pilkada, yakni Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara, termasuk wilayah yang terlanjur Covid-19. Pilkada tersebut akan menggelar TPS di semua kabupaten dan kota di provinsi setempat.

Kekhawatiran

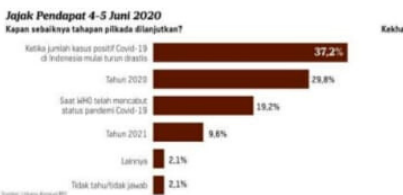
Jajak pendapat Kompas awal Juni mengungkapkan kekhawatiran yang tak hanya berkaitan dengan kesehatan penyelenggara, petugas, dan calon pemilih, tetapi juga dari sisi kualitas pilkada yang dihasilkan. Sebanyak 66,7 persen responden khawatir jika penyelenggaraan pilkada dilakukan di tengah pandemi Covid-19 dengan alasan takut terinfeksi Covid-19 saat ikut dalam tahapan pilkada. Sebagian besar responden (77,3 persen) menilai pilkada di tengah pandemi akan berdampak pada kualitas yang dihasilkan.

Komis Nasional Hak Asasi Manusia mengingatkan bahwa pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 tidak rasional. Komnas HAM menegaskan, pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 sangat berisiko, baik dari aspek kualitas pilkada maupun keselamatan masyarakat.

Meruka meminta pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu agar pilkada di 270 daerah tidak dilaksanakan tahun depan. Saat ini, kondisi psikologis dan ekonomi masyarakat sedang tidak dalam situasi normal. Akibatnya, kampanye dari peristiwa pilkada tidak dilihat secara rasional. Komnas HAM mengkhawatirkan fenomena jalinan keburukan jika seperti pada Pemilu 2019 akan terulang. Akibatnya, sejumlah tahapan akan memiliki tingkat konflik yang orag (Kompas, 16 Mei 2020).

Penyelenggara pilkada harus belajar dari kasus Pemilu 2019 yang merugikan nyawa 894 petugas dan 11.239 petugas meninggal akibat.

Kini, bila berada di tangan pemerintah, KPU, dan Bawaslu



Metode Penelitian: Jajak pendapat menggunakan teknik pengambilan pendapat secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner. Data diambil dengan menggunakan teknik pengambilan pendapat secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner. Data diambil dengan menggunakan teknik pengambilan pendapat secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan kuisioner.